



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan ✓✓.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

20. Peraturan..V

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 91 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2);

28. Peraturan **Y.**

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 122.247.542.343,03 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 881.629.390.625,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. 190.941.605.920,00 |

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.194.818.538.888,03

2. Belanja ...

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 573.312.919.377,80 | |
| 2) Belanja Hibah | Rp. 46.402.017.546,00 | |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 3.812.780.661,00 | |
| 4) Belanja Bagi Hasil | Rp. 2.682.057.655,00 | |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 134.896.883.634,00 | |
| 6) Belanja Tidak Terduga | Rp. 41.888.585.937,00 | |
| | | Rp. 802.995.244.810,80 |

b. Belanja Langsung

| | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 3.677.320.145,00 | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 270.744.280.786,00 | |
| 3) Belanja Modal | Rp. 107.785.756.266,00 | |
| | | Rp. 382.207.357.197,00 |
| Jumlah Belanja | | Rp. 1.185.202.602.007,80 |
| Surplus / (Defisit) | | Rp. 9.615.936.880,23 |

3. Pembiayaan

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | Rp. 67.510.252.092,70 | |
| b. Pengeluaran | Rp. 6.500.000.000,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | Rp. 61.010.252.092,70 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. 70.626.188.972,93 | |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.


EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, v



|  PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.213.102.819.688,00 | 1.194.818.538.888,03 | (18.284.280.799,97) | 98,49 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 122.967.860.890,00 | 122.247.542.343,03 | (720.318.546,97) | 99,41 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 20.137.972.873,00 | 17.810.752.982,90 | (2.327.219.890,10) | 88,44 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 4.804.972.546,00 | 5.498.289.935,50 | 693.317.389,50 | 114,43 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.529.052.483,00 | 19.307.769.675,00 | (221.282.808,00) | 98,87 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 78.495.862.988,00 | 79.630.729.749,63 | 1.134.866.761,63 | 101,45 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 896.086.918.590,00 | 881.629.390.625,00 | (14.457.527.965,00) | 98,39 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 18.622.638.590,00 | 14.078.424.431,00 | (4.544.214.159,00) | 75,60 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 651.739.765.000,00 | 646.914.341.000,00 | (4.825.424.000,00) | 99,26 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 225.724.515.000,00 | 220.636.625.194,00 | (5.087.889.806,00) | 97,75 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 194.048.040.208,00 | 190.941.605.920,00 | (3.106.434.288,00) | 98,40 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 46.770.700.000,00 | 46.494.381.214,00 | (276.318.786,00) | 99,41 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 44.631.061.208,00 | 43.229.071.193,00 | (1.401.990.015,00) | 96,86 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 102.646.279.000,00 | 101.218.153.513,00 | (1.428.125.487,00) | 98,61 |
| 2 | BELANJA | 1.274.683.513.001,70 | 1.185.202.602.007,80 | (89.480.910.993,90) | 92,98 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 830.067.071.679,65 | 802.995.244.810,80 | (27.071.826.868,85) | 96,74 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 586.082.756.441,21 | 573.312.919.377,80 | (12.769.837.063,41) | 97,82 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 48.058.552.125,00 | 46.402.017.546,00 | (1.656.534.579,00) | 96,55 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.987.050.000,00 | 3.812.780.661,00 | (1.174.269.339,00) | 76,45 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 3.403.183.541,00 | 2.682.057.655,00 | (721.125.886,00) | 78,81 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 136.550.009.120,00 | 134.896.883.634,00 | (1.653.125.486,00) | 98,79 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 50.985.520.452,44 | 41.888.585.937,00 | (9.096.934.515,44) | 82,16 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 444.616.441.322,05 | 382.207.357.197,00 | (62.409.084.125,05) | 85,96 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 5.451.722.886,00 | 3.677.320.145,00 | (1.774.402.741,00) | 67,45 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 321.045.910.063,17 | 270.744.280.786,00 | (50.301.629.277,17) | 84,33 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 118.118.808.372,88 | 107.785.756.266,00 | (10.333.052.106,88) | 91,25 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (61.580.693.313,70) | 9.615.936.880,23 | 71.196.630.193,93 | (15,62) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 68.257.413.163,70 | 67.510.252.092,70 | (747.161.071,00) | 98,91 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.676.719.850,00 | 6.500.000.000,00 | (176.719.850,00) | 97,35 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 61.580.693.313,70 | 61.010.252.092,70 | (570.441.221,00) | 99,07 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 70.626.188.972,93 | 70.626.188.972,93 | 0,00 |

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------------------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA | 435.033.948.383,21 | 428.132.904.458,00 | (6.901.043.925,21) | 98,41 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 355.942.315.421,21 | 354.526.160.500,00 | (1.416.154.921,21) | 99,60 | |
| 5.1.00.00.1 | Belanja Pegawai | 355.942.315.421,21 | 354.526.160.500,00 | (1.416.154.921,21) | 99,60 | |
| 5.1.00.00.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 345.071.881.321,21 | 344.034.777.506,00 | (1.037.103.815,21) | 99,70 | |
| 5.1.00.00.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 183.040.018.481,21 | 182.226.207.227,00 | (813.811.254,21) | 99,56 | |
| 5.1.00.00.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 16.646.134.000,00 | 16.572.208.373,00 | (73.925.627,00) | 99,56 | |
| 5.1.00.00.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 245.267.900,00 | 243.245.000,00 | (2.022.900,00) | 99,18 | |
| 5.1.00.00.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 15.596.365.700,00 | 15.518.270.000,00 | (78.095.700,00) | 99,50 | |
| 5.1.00.00.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 857.999.800,00 | 854.608.000,00 | (3.391.800,00) | 99,60 | |
| 5.1.00.00.1.01.06 | Tunjangan Beras | 7.697.334.200,00 | 7.647.189.900,00 | (50.144.300,00) | 99,35 | |
| 5.1.00.00.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 424.121.200,00 | 423.979.374,00 | (141.826,00) | 99,97 | |
| 5.1.00.00.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 2.290.400,00 | 2.289.777,00 | (623,00) | 99,97 | |
| 5.1.00.00.1.01.24 | Tunjangan Profesi Guru PNSD | 119.851.349.640,00 | 119.836.029.855,00 | (15.319.785,00) | 99,99 | DAK Non Fisik |
| 5.1.00.00.1.01.25 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 711.000.000,00 | 710.750.000,00 | (250.000,00) | 99,96 | DAK Non Fisik |
| 5.1.00.00.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara | 10.870.434.100,00 | 10.491.382.994,00 | (379.051.106,00) | 96,51 | |
| 5.1.00.00.1.02.07 | Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara | 10.870.434.100,00 | 10.491.382.994,00 | (379.051.106,00) | 96,51 | Perbup Nomor 61 Tahun 2019 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 79.091.632.962,00 | 73.606.743.958,00 | (5.484.889.004,00) | 93,07 | |
| 5.2.00 | Non Program | 0,00 | 33.911.687.483,00 | 33.911.687.483,00 | 0,00 | |
| 5.2.00.00 | Non Kegiatan | 0,00 | 33.911.687.483,00 | 33.911.687.483,00 | 0,00 | |
| 5.2.00.00.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 23.714.242.994,00 | 23.714.242.994,00 | 0,00 | |
| 5.2.00.00.2.22 | Belanja Barang Dana BOS | 0,00 | 23.714.242.994,00 | 23.714.242.994,00 | 0,00 | |
| 5.2.00.00.2.22.01 | Belanja Barang Dana BOS | 0,00 | 23.714.242.994,00 | 23.714.242.994,00 | 0,00 | |
| 5.2.00.00.3 | Belanja Modal | 0,00 | 10.197.444.489,00 | 10.197.444.489,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.17.35.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) | 0,00 | |
| 5.2.17.35.2.03.25 | Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) | 0,00 | |
| 5.2.17.35.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.057.500,00 | 1.057.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.17.35.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.057.500,00 | 1.057.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.17.35.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.134.000,00 | 712.800,00 | (421.200,00) | 62,86 | |
| 5.2.17.35.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.134.000,00 | 712.800,00 | (421.200,00) | 62,86 | |
| 5.2.17.35.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman keglatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.17.35.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.064.925,00 | 3.020.000,00 | (44.925,00) | 98,53 | |
| 5.2.17.35.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3.064.925,00 | 3.020.000,00 | (44.925,00) | 98,53 | |
| 5.2.17.35.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (9.273.837.855,00) | (4.277.888.617,00) | 4.995.949.238,00 | 46,13 | |

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

